

13 Ijin Amdal Batu Bara Dicabut

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Bupati Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, mencabut ijin Amdal 13 perusahaan tambang dari 27 perusahaan tambang yang diduga bermasalah oleh Kementerian LH. Diduga ke 13 perusahaan tambang tersebut terdiri dari delapan perusahaan yang beroperasi dengan amdal bodong dan lima perusahaan dengan ijin amdal non prosedural.

Perusahaan tersebut, yakni PT Borneo Indo Bara, PT Baramega Global Mandiri, PT Bintuni Steenkol Prima, PT Kamikawa Gawi Sabumi, PT Dharma Kencana, PT Borneo Orbit Sukses Sejati, PT Tri Tunggal Mandiri, PT Berkat Sarana Buana, PT Total Orbit Prestasi, PT Citra Nusa Jaya, PT Seia Mitra Mandiri, PT Bumi Dharma Kencana dan PT Surya Kencana Asri.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ir H Rachmadi Kurdi, MSi, menyatakan, setelah dicabutnya 13 ijin kuasa pertambangan (KP) batubara, maka kini masih ada 14 KP yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Bupati Tanah Bumbu. "Saya kira langkah Bupati Tanbu yang mencabut 13 KP yang bermasalah itu sudah benar," ujarnya di Banjarmasin, kemarin.

Kuasa Pertambangan batubara itu disebut 'bodong', kata Rachmadi, karena surat keputusan (SK) tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) nya ada, tetapi dokumen Amdalnya tidak ada. Untungnya, dari delapan KP batubara yang amdalnya 'bodong' di Kabupaten Tanbu tersebut, sampai saat ini belum beroperasi, ucapnya.

Dari 13 KP batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicabut ijin Amdalnya oleh bupati setempat itu, hanya ada satu perusahaan yang sudah beroperasi yakni PT Borneo Indo Bara (BIB), katanya.